



Tunggakan PBB Rp47 Miliar

YOGYA, TRIBUN - Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPD-PK) Kota Yogyakarta menyebut tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah tersebut hingga 2014 lalu mencapai Rp47 miliar.

Kepala DPDPK Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan, jumlah tersebut dibagi menjadi dua periode. Periode pertama tahun 1994-2012 ketika masih ditangani KPP Pratama, tunggakan PBB mencapai Rp32 miliar. Sedangkan pada 2012-2014 PBB setelah ditangani Pemerintah Kota Yogyakarta, jumlah tunggakan mencapai Rp15 miliar.

"Masalah yang

kerap terjadi sehingga terjadi tunggakan, karena wajib pajak tidak lagi tinggal di Yogyakarta. Atau biasanya ada konflik sengketa tanah," kata Kadri di sela penyerahan surat pemberitahuan pajak tertunggak (SPPT) PBB di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (26/2).

Dengan tunggakan sebanyak itu, maka mulai tahun ini, Pemkot Yogyakarta akan mengirimkan surat peringatan kepada wajib pajak PBB yang menunggak. Kadri pun menegaskan, saat ini pihaknya fokus dalam penarikan tunggakan wajib pajak yang menunggak di 2014.

"Tapi bukan berarti kami tidak menindak penunggakan sejak tahun 1994 tersebut. Semua wajib

pajak yang menunggak tetap akan kami berikan surat peringatan," imbuh Kadri.

Bagi wajib pajak yang menunggak, PDPK Kota Yogyakarta pun akan menerapkan sanksi. Sanksi itu berupa denda bagi wajib pajak yang telat membayar. Nominal denda yang diberlakukan sebesar dua persen per bulan dengan maksimal denda 48 persen.

Sementara itu, ketetapan PBB Kota Yogyakarta pada tahun ini mengalami kenaikan sekitar Rp5 miliar dari sekitar 92 ribu wajib pajak. Tahun sebelumnya, ketetapan PBB hanya Rp52 miliar, sedangkan tahun ini menjadi Rp57,1 miliar.

■ Bersambung ke Hal 14

Tunggakan PBB

Sambungan Hal 13

"Faktor kenaikan salah satunya karena juga adanya kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) hingga enam kelas," kata Kadri.

Namun meski jumlah ketetapan PBB naik menjadi Rp57,1 miliar, target penerimaan PBB Kota Yogyakarta saat ini hanya Rp48 miliar saja. Target yang dipatok, katanya, sesuai hasil pertimbangan dari banyaknya wajib pajak yang menunggak.

"Untuk mengatasi wajib pajak yang menunggak, kami akan mengadakan pekan pembayaran PBB

pada April atau Mei. Di sini kami akan melakukan jemput bola untuk pembayaran PBB di kecamatan dan kelurahan" jelas Kadri.

Sementara Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Titik Sulastri mengatakan, target pendapatan PBB sebesar Rp48 miliar bisa dicapai. Karena pajak sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan.

"Tahun ini pemenuhannya diharapkan melebihi target. Karena tahun kemarin bisa melebihi target hingga 104,4 persen," ujar Titik. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005